

## **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 DI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN SITARO**

*Casimira A. David<sup>1</sup>*  
*Jamin Potabuga<sup>2</sup>*  
*Trilke Tulung<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (Warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa ke depan. Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kabupaten SITARO menurut pengamatan saya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertama, sejak pemilu pada tahun 2015, 2010 sampai dengan tahun 2015, merupakan pemilihan yang dilakukan dengan sistem yang lebih demokratis dan terbuka namun pemahaman masyarakat terhadap politik praktis yang masih rendah sehingga tidak berpikir rasional dan kepentingan jangka panjang tentang tatanan membangun kepentingan bangsa dan daerah kedepan dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek yang bersifat pragmatis.

**Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil

maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan fakta terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih karena disebabkan oleh berbagai faktor. Pemilihan umum selama periode orde baru tingkat partisipasi pemilih setiap penyelenggaraan pemilu selalu di atas 90%. Partisipasi politik di bawah rezim pemerintahan Soeharto dinilai semu, sejumlah factor yang menggiring pada persepsi ini adalah represi politik dan model mobilisasi yang sangat kuat selama enam periode pemilu sepanjang 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Partisipasi pemilu pada era Orde Baru memang memiliki kecenderungan turun dalam setiap penyelenggaraan, tetapi penurunannya tak terlalu signifikan. Pada penyelenggaraan pemilu pertama di era reformasi, antusiasme pemilih masih tinggi, tercatat lebih dari 92,74% pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif di kabupaten sitaro. Dalam pemilu Gubernur dan wakil Gubernur di kabupaten Sitaro yang diselenggarakan dengan sistem langsung untuk pertama kali pada tahun 2005, tingkat partisipasi menurun drastis berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU tercatat 90,72% jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sampai 15,93%. Jumlah tersebut kembali menurun menjadi 23,37% jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya menjadi 80,41% pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2010 angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan lagi pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pada tahun 2015 sebesar 29,21% dibandingkan pemilu yang dilakukan

sebelumnya tapi penurunan itu cukup signifikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2015 sehingga angka partisipasi politik masyarakat yang ada di Sitaro 70,69%.(sumber data KPU tahun 2015). Adapun hasil rekapitulasi suara untuk semua calon di kabupaten sitaro adalah 38.192, dengan jumlah pemilih 54.560 dan masyarakat yang berpartisipasi pada pemilukada di kecamatan siau barat dengan jumlah pemilih 7.187 yang menggunakan hak pilih 5.105.

Meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kabupaten Sitaro menurut pengamatan saya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah Pertama, sejak Pemilukada tahun 2005, 2010 sampai dengan tahun 2015, merupakan pemilihan yang dilakukan dengan sistem yang lebih demokratis dan terbuka namun pemahaman masyarakat terhadap politik praktis yang masih rendah sehingga tidak berpikir rasional dalam kepentingan jangka panjang tentang tatanan membangun kepentingan bangsa dan daerah ke depan dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek yang bersifat pragmatis. Kedua, pemilih pemula yang memiliki jumlah yang cukup signifikan yang sebagian besar baru memasuki hak pilih tidak memahami pengetahuan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih, adapun jumlah pemilih pemula yang ada adalah 15% dari jumlah pemilih yang ada di kabupaten sitaro. selanjutnya juga sosialisasi arti dan manfaat pemilihan dan juga pengenalan akan calon tidak dilakukan sebagaimana yang ada. Walaupun dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi belum dijabarkan sampai ditingkat masyarakat yang paling bawah mengingat masyarakat di kabupaten Sitaro adalah masyarakat yang tinggal di kepulauan dan pedesaan yang berpola pada masyarakat yang hidup secara tradisional yang juga kalah akan pengetahuan dan informasi karena jauh dari kota yang telah tersedia akses informasi dan komunikasi .

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil wakilnya.Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penyeleggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian diatas Kabupaten Sitaro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki warga masyarakat yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai dengan undang-undang demi mensukseskan demokrasi di negeri ini, namun kelihatan yang ada tingkat keseriusan dari pada masyarakat Sitaro untuk menyukseskan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur ini terlihat dengan keenggannya masyarakat dalam ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan adanya sifat acuh tak acuh sehingga kurangnya kehadiran masyarakat untuk

menghadiri setiap proses kegiatan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur propinsi Sulawesi Utara. mengacu pada permasalahan tersebut saya ingin meneliti tentang Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 di Kabupaten Sitaro khususnya di kecamatan siau barat.

## Tinjauan Pustaka

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Masyarakat tentunya dalam mewujudkan haknya dalam partisipasi politik, dilakukan dengan menggunakan hak pilih dimana terkandung maksud adalah hak untuk menentukan pilihannya terhadap seseorang atau partai yang dapat membawa kepentingan dan aspirasinya, Sukarna (2007). Sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diantaranya dengan memilih Gubernur dan wakil Gubernur. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Prilaku-prilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Menurut Budiarjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson (2006), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Davis (2013), partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga

negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dalam buku pengantar sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff (2005) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- Menduduki jabatan politik atau administrasi;
- Mencari jabatan politik atau administrasi;
- Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- Partisipasi dalam diskusi politik internal
- Partisipasi dalam pemungutan suara.

Sastroatmodjo (2007) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Ada beberapa macam definisi mengenai pemilu, diantaranya adalah menurut Nohlen (2012), dimana pemilihan umum (pemilu) adalah "satu-satunya metode demokratik" untuk memilih wakil rakyat.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya

demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari system otoritarian, penyelenggaraan pemilu tahun 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kekacauan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Momentum pemilukada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Harapan besar mengenai implikasi pemilukada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih

berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara deskriptif yaitu, dimana peneliti menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu, penetapan fokus akan membatasi jadi dalam fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi atau criteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh sehingga focus dalam penelitian ini akan melihat partisipasi politik konvensional di kabupaten Sitiro dalam pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Sulawesi Utara.

Menurut Almond (Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney 1990) bentuk partisipasi politik secara konvensional yaitu :

1. Pemberian suara (voting)
2. Diskusi politik
3. Kegiatan kampanye
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative

Penelitian ini yang menjadi sumber informasi atau informan adalah orang-orang yang ada dilapangan yang dapat memberikan informasi serta data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu:

1. Anggota KPU SITARO 2 Orang (L2)
2. Anggota PPK Siau Barat 2 Orang (L2)
3. Anggota LSM 1 Orang (L)
4. Pimpinan Partai Politik Kecamatan Siau Barat 3 Orang (L3)
5. Anggota Masyarakat wajib Pilih yang menggunakan hak pilih 3 Orang (L2 + P1)
6. Anggota Masyarakat wajib Pilih yang tidak menggunakan hak pilih 3 Orang (L2+P1)

## Hasil Penelitian

### 1. Pemberian Suara

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Ketua dan Anggota panitia Pemilihan Kecamatan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, beberapa Ketua Pimpinan anak Cabang Partai Politik di Kecamatan Siau Barat, Beberapa Masyarakat yang menggunakan hak Suara dan juga yang

tidak Menggunkan Hak Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi utara Tahun 2015). Menurut peneliti dalam pemberian Hak suara di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi utara pada tahun 2015, dianggap cukup berkualitas di mana masyarakat yang memilih cukup rasional di banding Tahun 2010 yang meskipun dalam presentasi Cukup tinggi akan tetapi Masyarakat memilih berdasarkan latar belakang Sebagai putra Daerah tanpa melihat Track Rekordnya dalam berpolitik.

### 2. Diskusi Politik

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Ketua dan Anggota panitia Pemilihan Kecamatan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, beberapa Ketua Pimpinan anak Cabang Partai Politik di Kecamatan Siau Barat, Beberapa Masyarakat yang menggunakan hak Suara dan juga yang tidak Menggunkan Hak Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi utara Tahun 2015)

Peneliti melihat dalam hal diskusi politik, Penyelenggara Pemilu belum memaksimalkan peranannya untuk mengedukasi dan mengadvokasi Pemilih dan juga fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik masih jauh dari kata cukup, lembaga Swadaya masyarakat juga belum maksimal akan tetapi bentuk kerjanya lebih nyata. Hal ini menyebabkan Animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bertemakan tentang plolitik menjadi sangat berkurang.

### 3. Kegiatan kampanye

Partispasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye

yang di lakukan oleh masing-masing pasanagan calon agak berkurang pada Tahun 2015 jika di lihat Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Ketua dan Anggota panitia Pemilihan Kecamatan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, beberapa Ketua Pimpinan anak Cabang Partai Politik di Kecmaatan Siau Barat, Beberapa Masyarakat yang menggunakan hak Suara dan juga yang tidak Menggunkan Hak Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi utara Tahun 2015) ternya terjadi ada beberapa factor, yaitu kurangnya edukasi tentang Politik dari stake holder, pola kampanye yang itu-itu saja dari tim-tim sukses pasangan calon, bahkan isu-isu yang di angkat dalam melakukan kampanye masih merupakan isu yang sudah lumrah dalam kampanye-kampanye yang di lakukan pada setiap momentum politik. Ini menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam melakukan dan turut serta sebagai peserta dalam beberapa kegiatan kampanye.

#### 4. Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Ketua dan Anggota panitia Pemilihan Kecamatan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, beberapa Ketua Pimpinan anak Cabang Partai Politik di Kecmaatan Siau Barat, Beberapa Masyarakat yang menggunakan hak Suara dan juga yang tidak Menggunkan Hak Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi utara Tahun 2015) partisipasi masyarakat dalam hal membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan di lihat cukup baik namun masih perlu mendapatkan edukasi lagi tentang bagaimana pentingnya memeperjuangkan Kepentingan Politik yang di salurkan melalui Kelompok-kelompok Kepentingan.

#### 5. Komunikasi Individual dengan Pejabat politik dan adminstrativ

Berdassrkan wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat yang menggunakan Hak Pilihnya dan juga masyarakat yang tidak Menggunakan hak Pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, peneliti melihat kepedfulian terhadap Politik dengan Membangun Komunikasi dengan Pejabat Politik sudah Cukup baik, namun itu tidak di lakukan oleh sebagian Masyarakat Kecamatan Siau barat.

### Kesimpulan

1. Partisipasi dalam hal pemberian hak suara sudah cukup baik secara kualitas, namun dalam kuantitas mengalami penurunanyakni pada tahun 2010 sebanyak 79,065 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 68,83% hal ini, di sebabkan mindset atau cara pandang sebagian dari masyarakat bahwa untuk memilih pemimpin harus berdasarkan kedekatan secara emosional bukan berdasarkan track Record dari pasangan calon, hal ini juga di pengaruhi keadaan social Budaya dari masyarakat Kabupaten kepulauan Siau tagulandang Biaro yang merupakan Eks kerajaan pada Masa Sebelum Indonesia Merdeka.
2. Partisipasi dalam hal Diskusi Politik masih kurang, hal ini di akibatkan tidak maksimalnya peran Para pemangku kepentingan untuk



Memberikan Referensi yang cukup tentang pasangan calon yang nanti akan di pilih, hal ini juga di pengaruhi dengan di aturnya Jumlah alat peraga kampanye Seperti baliho dan Spanduk yang pada tahun 2010 di sediakan sendiri oleh pasangan calon.

3. Partisipasi secara langsung masyarakat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur 2015, cukup baik meskipun dari segi animo mengalami pengurangan jika di bandingkan dengan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2015, hal ini di sebabkan oleh Lemahnya Peran Tim Sukses dalam Mensosialisasikan Visi & Misi dari Pasangan Calon dan Juga dalam membangun Opini tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terhadap Masyarakat yang ada di Kecamatan Siau Barat.
4. Adanya penurunan Partisipasi masyarakat dalam membentuk dan bergabung kelompok kepentingan di sebabkan oleh Kurangnya edukasi Tentang pentingnya masyarakat mengambil bagian dalam kelompok kepentingan dan juga tidak maksimalnya Partai politik Pengusung Calon Gubernur dan wakil Gubernur Melakukan perekrutan Kader.
5. Kurangnya pengetahuan akan Politik dari masyarakat yang di sebabkan dari tidak maksimalnya Stake Holders di kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro dalam melakukan Pendidikan Politik dan juga Protokoler Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang agak Bebelit-belit menjadi factor utama Kurangnya Partisipasi dalam komunikasi Individual dengan pejabat Politik dan Adminstratif oleh Masyarakat.

## Saran

1. Pemerintah kecamatan, Penyelenggara Pemilihan dan bahkan Partai Politik harus Lebih Lagi Mengintenskan pendidikan Politik dan Meberikan Pengertian Kepada masyarakat awam dalam rangka membuka cara pandang mereka untuk boleh memilih pemimpin bukan hanya di lihat dari kacamata sebagai kedekatan Emosiunal, Primordial namun harus berdasarkan Indikator-indikator yang jelas.
2. Penyelenggara dan partai politik harus lebih sering lagi menyampaikan referensi-referensi Diskusi politik terhadap Masyarakat Secara Keseluruhan Tentang Politik.
3. Setiap partai Politik yang menjadi pengusung dan Pendukung Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur harus lebih di bekali lagi oleh partai dalam hal penggalangan Masa.
4. Penyelenggara harus melancarkan edukasi Tentang pentingnya masyarakat mengambil bagian dalam kelompok kepentingan dan juga tidak maksimalnya Partai politik Pengusung Calon Gubernur dan wakil Gubernur Melakukan perekrutan Kader.
5. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membangun komunikasi individual masyarakat dengan pejabat Politik maupun Adminstratif untuk mencapai tujuan dari masyarakat, dan juga pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Pelu lebih mendekati dengan Masyarakat secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Althoff, Phillip dan Rush, Michael. 2005. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. Budaya Politik, Tingkah Laku Politik

- dan Demokrasi di Lima Negara. Bina Aksara. Jakarta.
- A Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- A , Rahman, 2007.H.I. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Cholisin, dkk. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.
- Davis J.J. 2013.Penelitian Periklanan Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eman Hermawan. 2001. Politik Membela yang Benar: Yogyakarta: Yayasan KLIK.
- Joan Nelson & Samuel PHuntington. 2006. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta.
- Nohlen, Dieter.2005. Studi Pemilu Empiris, Mitra Alembana Grafika, Jakarta.
- Sastroatmodjo, Soejono. 1995. Perilaku Politik.IKIP Semarang Press. Semarang.
- Sukarna.Dasar-Dasar Manajemen.2017.CV. Mandar Maju. Bandung. Rineka Cipta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.Metode Penelitian. 2007. Jakarta: CV. Alfa Beta.